



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170/SK - 82/XII/2017**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2018 MENJADI PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD;
 - b. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2017 telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan LN RI Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4659);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 825);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2017 Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapten Kutai Kartanegara (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 1);

Memperhatikan: Rapat Paripurna Ke – 22 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 20 Desember 2017 tentang Laporan Badan Anggaran dan Persetujuan Rancangan APBD menjadi APBD Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|
| A. Pendapatan | Rp. | 3.684.294.991.457,10 |
| - Pendapatan Asli Daerah | Rp. | 329.912.910.897,10 |
| - Dana Perimbangan | Rp. | 2.946.272.696.560,00 |
| - Lain-lain Pendapatan yang sah | Rp. | 408.109.384.000,00 |
| B. Belanja | Rp. | 4.365.071.979.157,76 |
| - Belanja Tidak Langsung | Rp. | 2.268.682.191.851,97 |
| - Belanja Langsung | Rp. | 2.096.389.787.305,79 |
| Selisih Kurang Pendapatan | Rp. | (680.776.987.700,66) |
| C. Pembiayaan | Rp. | 680.776.987.700,66 |
| - Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 685.776.987.700,66 |
| - Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 5.000.000.000,00 |
| Selisih Lebih Pembiayaan | Rp. | 0,00 |
| D. Jumlah | Rp. | 4.370.071.979.157,76 |

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus tetap mempertahankan alokasi belanja modal lebih besar dari belanja pegawai dan barang dan jasa dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus menunda pinjaman daerah ke PT.SMI sebesar Rp. 950.714.226.000,00

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Desember 2017

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



SALEHUDDIN

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di- Samarinda
2. Plt. Bupati Kab. Kutai Kartanegara di- Tenggarong
3. Arsin